



RENCANA STRATEGIS

Perangkat Daerah
Kabupaten Pekalongan
Tahun 2025 - 2029

DINAS KOPERASI
USAHA KECIL DAN MENENGAH
DAN TENAGA KERJA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja (DINKOP UKM DAN NAKER) periode 2025–2029 dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan Renstra ini mengacu pada Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Dokumen ini secara esensial menjabarkan visi, misi, dan program strategis DINKOP UKM DAN NAKER sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang kemudian dikonkretkan ke dalam tujuan, sasaran, strategi, dan program kerja yang terukur dan terarah.

Kami berharap dokumen ini dapat menjadi panduan yang sistematis dan akuntabel bagi seluruh jajaran DINKOP UKM DAN NAKER dalam melaksanakan tugas dan fungsi, serta memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan memberikan kontribusi bagi pencapaian visi misi pemerintah daerah serta membawa manfaat bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Renstra ini tidak terlepas dari dukungan dan kontribusi berbagai pihak. Oleh karena itu, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pihak yang bersangkutan atas dedikasi dan kerja samanya.

Kami menyadari pula bahwa dokumen ini masih memiliki ruang untuk perbaikan. Kritik, saran, dan masukan yang konstruktif dari semua pihak sangat kami harapkan demi penyempurnaan implementasi dan evaluasi Renstra di masa mendatang.

Dengan adanya Rentra ini diharapkan dapat berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen rencana kerja tahunan untuk mendukung dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Kajen, 15 September 2025

Plt. KEPALA DINKOP, UKM DAN NAKER
KABUPATEN PEKALONGAN



ARGO YUDHA ISMOYO, S.STP., M.A.P.

Rembina (IV/a)
NIP. 19870411 200602 1 002

HALAMAN VERIFIKASI

RENCANA STRATEGIS DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2029

Disusun Oleh :
TIM PENYUSUN RENSTRA
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN PEKALONGAN

Telah diteliti dan diverifikasi oleh Petugas Verifikator :

Pada tanggal 8 September 2025

Kepala Bidang Ekonomi dan Infrastruktur
Bapperida Kab. Pekalongan



(Widi Hari Nugroho, ST. MT)
NIP. 19761020 200501 1 009

Verifikator,



(Aditya Darmawan, S.E)
NIP. 19950806 201902 1 002

Mengetahui,
PIH KEPALA DINKOP, UKM DAN NAKER
KABUPATEN PEKALONGAN



ARGO YUDHA ISMOYO, S.STP., M.A.P.

Pembina (IV/a)
NIP. 19870411 200602 1 002

BAB I

PENDAHULUAN

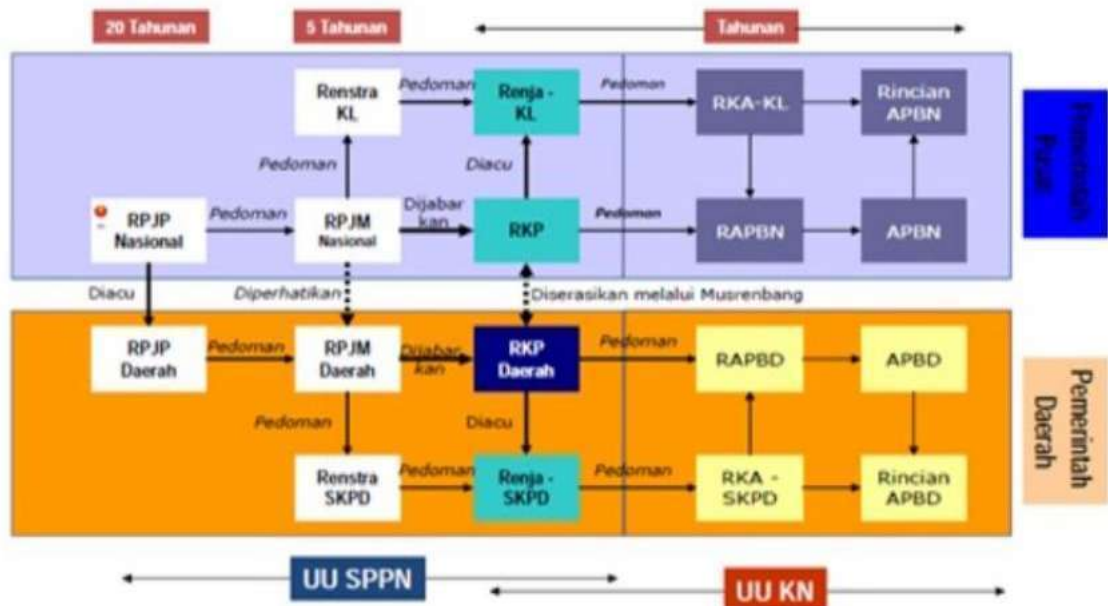
1.1. Latar Belakang

Sistem perencanaan pembangunan di Indonesia mengalami perubahan sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan kedua peraturan perundangan tersebut, pemerintah daerah diberikan kesempatan yang luas dalam merencanakan pembangunan di daerah sesuai dengan kewenangannya.

Dalam rangka menjalankan tugas-tugas pemerintahan, pemerintah daerah berkewajiban menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Pada tingkat Perangkat Daerah (PD), dokumen perencanaan pembangunan yang harus disusun terdiri dari 2 jenis, yaitu Rencana Strategis (Renstra) PD sebagai dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah, dan Rencana Kerja (Renja) PD sebagai dokumen perencanaan tahunan SKPD. Rencana Strategis (Renstra) PD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.

Pasal 272 UU 23/2014 menyebutkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra berdasarkan atas RPJMD. Renstra tersebut paling tidak memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Sedangkan pada Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Kepala Perangkat Daerah (PD) diamanatkan

untuk menyiapkan Rancangan Renstra PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, yang penyusunannya berpedoman pada rancangan awal RPJMD. Rencana Strategis PD disusun untuk menjamin keberlangsungan dan konsistensi program/kegiatan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai dalam periode tersebut.



Gambar 1. Posisi Renstra dalam Sistem Perencanaan Pembangunan

Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang koperasi, UKM dan Tenaga Kerja. Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja merupakan salah satu perangkat daerah tipe B yang dibentuk dengan dasar Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan.

Penyusunan Renstra Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

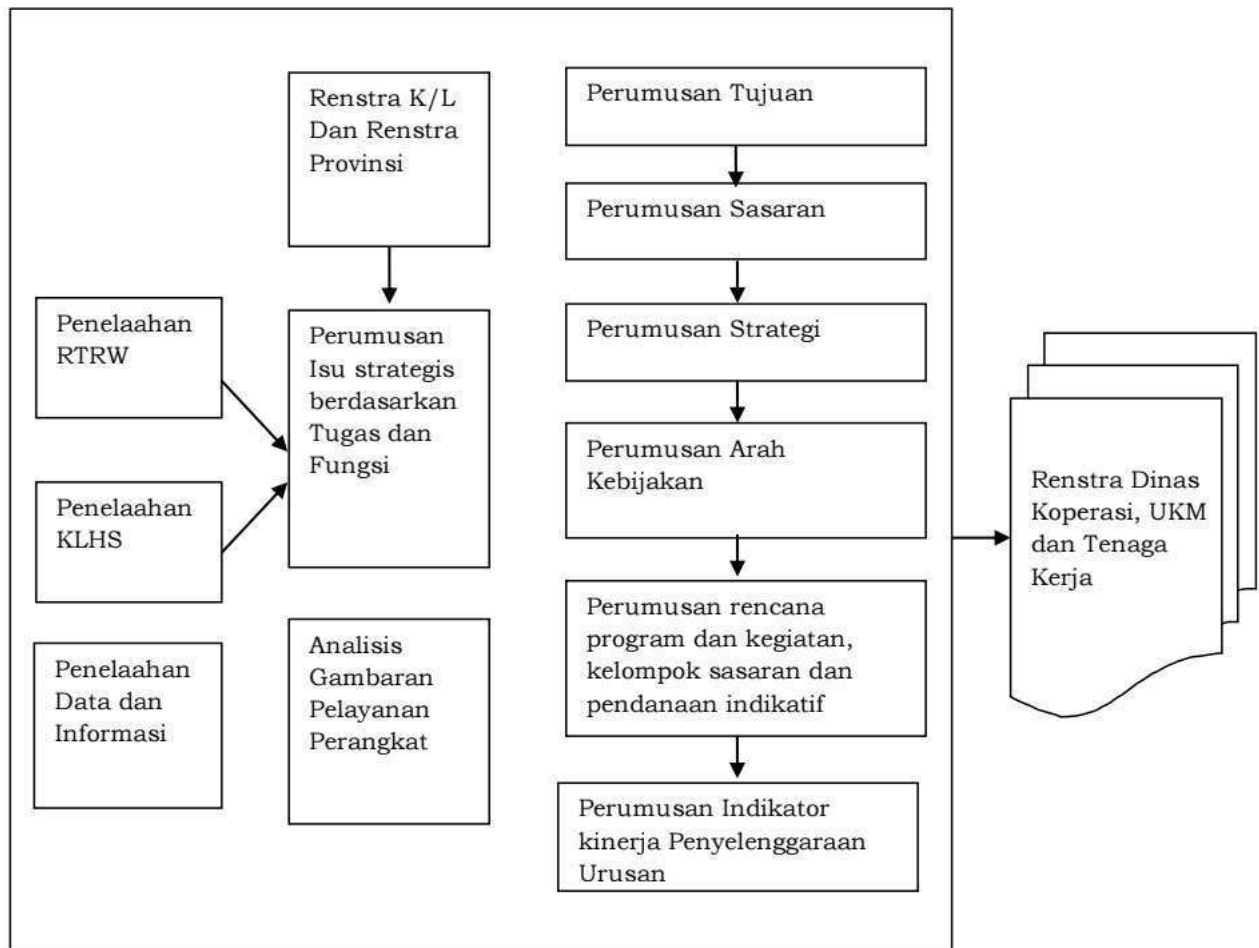
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja disusun melalui beberapa tahapan, meliputi: (1) Persiapan penyusunan Renstra; (2) penyusunan rancangan awal Renstra dengan berpedoman pada rancangan awal RPJMD Kabupaten Pekalongan; (3) penyusunan rancangan renstra; (4) Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah; (5) perumusan rancangan Akhir Renstra dengan RPJMD; dan (6) penetapan renstra.



Gambar 2. Tahapan Penyusunan Renstra Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan

Pendekatan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, terdiri dari pendekatan yang berorientasi pada substansi renstra, dan pendekatan yang berorientasi pada proses penyusunan. Pertama adalah pendekatan-pendekatan yang berorientasi pada substansi meliputi: pendekatan Holistik-Tematik, pendekatan integratif dan pendekatan spasial. Tematik, holistik, integratif, dan spasial merupakan penjabaran tema Prioritas Pembangunan ke dalam perencanaan yang menyeluruh mulai dari hulu hingga hilir suatu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam keterpaduan pemangku kepentingan dan pendanaan, serta dalam

satu kesatuan wilayah dan keterkaitan antarwilayah. Pendekatan kedua adalah pendekatan yang berorientasi proses, yakni meliputi pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas.



Gambar 3. Proses Penyusunan Renstra Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan

Selain mengacu pada dokumen RPJMD Kabupaten Pekalongan, Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan juga memperhatikan beberapa dokumen perencanaan lainnya, seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pekalongan, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Pekalongan; dan juga Renstra Kementerian dan Perangkat yang menjalankan urusan pemerintahan yang sejenis.

Dokumen Renstra ini nantinya akan memberikan pedoman, arah dan tujuan yang jelas bagi Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan untuk lima tahun mendatang. Renstra ini selanjutnya akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan sebagai dokumen perencanaan tahunan PD yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
15. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 159);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 19);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 56), sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

- Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 114);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 85).
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 93);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 122);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 130);
 23. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pekalongan.

1.3. Maksud Dan Tujuan

1.3.1. Maksud

- a. Sebagai penjabaran atas RPJMD Kabupaten Pekalongan tahun 2025-2029 sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan
- b. Sebagai arah dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan selama kurun waktu 5 (lima) tahun (2025-2029).

1.3.2. Tujuan

Tujuan Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai acuan dan/atau pedoman kerja bagi seluruh unsur Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan
- b. Sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja (Renja) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan setiap tahunnya,
- c. Sebagai dasar melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan tahun 2025-2029.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan adalah sebagai berikut

- 1. Bab I Pendahuluan,** menguraikan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan dan sistematika

penulisan.

- 2. Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah,** menguraikan tentang gambaran Pelayanan Perangkat Daerah yang di dalamnya memuat Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah, Sumberdaya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan, Kelompok sasaran layanan, dan merumuskan Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
- 3. Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan,** menguraikan tentang tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pencapaian Renstra Tahun 2025-2029
- 4. Bab IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggara Bidang Urusan,** menguraikan tentang uraian program, kegiatan, subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif, subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah, dan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran renstra perangkat daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kerja Utama (IKU) Perangkat Daerah, serta Indikator Kinerja Kunci (IKK)
- 5. Bab V Penutup,** menguraikan tentang Kesimpulan Subtansial, pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan serta pengendalian evaluasi Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah. Susunan organisasi perangkat daerah adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
3. Bidang Koperasi
4. Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
5. Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
6. UPT.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Adapun uraian tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
Tugas:
Memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas
2. Sekretariat
Tugas:

Melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

Fungsi:

- a. Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. Penyiapan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
- c. Penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi bidang ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat dan kearsipan di lingkungan Dinas;
- d. Penyiapan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- e. Penyiapan koordinasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi;
- f. Penyiapan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- g. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Koperasi

Tugas:

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Kelembagaan, Pengembangan Usaha dan Fasilitasi Pembiayaan serta Pengawasan.

Fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Kelembagaan, Pengembangan Usaha dan Fasilitasi Pembiayaan;

- b. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengawasan; dan
 - c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Tugas:

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, Pengembangan Usaha Mikro dan Fasilitasi Pembiayaan Usaha Mikro.

Fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan Usaha Mikro;
 - b. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengembangan Usaha Mikro dan Fasilitasi Pembiayaan Usaha Mikro; dan
 - c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

Tugas:

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja, Penempatan, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi serta Persyaratan Kerja, Pengupahan dan Jaminan Sosial dan Penanganan Perselisihan Hubungan Industrial.

Fungsi:

2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Sumber Daya Manusia

Komposisi sumber daya yang dimiliki Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan tahun 2025 sejumlah 38 orang (Tenaga Kerja) dengan laki-laki berjumlah 16 orang dan perempuan berjumlah 19 orang. Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan di Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten
Pekalongan Tahun 2025

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SD sederajat	0	0	0	0	0
2	SMP Sederajat	0	0	0	0	0
3	SMA Sederajat	2	0	0	0	2
4	D3	2	1	0	0	3
5	S1	9	16	0	3	28
6	S2	3	2	0	0	5
7	S3	0	0	0	0	0

Jumlah pegawai berdasarkan golongan di Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai dan Kebutuhan Pegawai
Berdasarkan Golongan
di Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja dan Tenaga
Kerja Kab. Pekalongan Tahun 2025

No	Golongan	Kondisi Awal 2025	Kebutuhan			
			2026	2027	2028	2029
1	Golongan II	2	14	14	15	16
2	Golongan III	30	27	27	27	27
3	Golongan IV	3	5	5	6	6

2. Sarana dan Prasarana (Asset)

Adapun rekapitulasi inventaris sumberdaya aset Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi
di Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten
Pekalongan Tahun 2025

No.	Nama Barang/Jenis Barang	Satuan	Kondisi		Jumlah
			Baik	Rusak	
1	Peralatan dan Mesin	Unit	100	60	160
2	Gedung dan Bangunan	Unit	5	4	9
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Unit	1	-	1
4	Aset tetap lainnya	Unit	107	28	135
JUMLAH			213	92	305

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa kondisi sarana dan prasarana yang ada dalam kondisi baik 213 unit dan kondisi rusak 92 unit, dengan tahun perolehan rata-rata di bawah tahun 2016. Kondisi lebih spesifiknya menunjukkan jumlah peralatan dan mesin yang tersedia tidak dapat memenuhi kebutuhan untuk pelaksanaan kegiatan operasional sehari-hari. Jika hal tersebut terus terjadi, maka akan menjadi kendala dan masalah yang sangat berpengaruh terhadap capaian kinerja organisasi.

Untuk itu maka dibutuhkan dukungan alokasi anggaran yang mencukupi guna memenuhi kebutuhan pengadaan peralatan kantor agar dapat mengoptimalkan kinerja operasional dalam pencapaian target yang telah ditentukan.

Tabel 2.4
Kebutuhan Sarpras Dinkop UKM dan Naker
Kabupaten Pekalongan

No	Nama Barang/Jenis	Satuan	Tahun				
			2025	2026	2027	2028	2029
1.	Peralatan dan Mesin	Unit	5	5	7	10	15
2.	Jalan dan Jaringan	Unit	1	1	1	1	1
3.	Aset Tetap Lainnya	Unit	4	4	5	6	7

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja secara umum mengacu pada kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terkait penyelenggaraan urusan :

a. Koperasi dan UKM meliputi :

- 1) Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif
- 2) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM
- 3) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
- 4) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
- 5) Program Peningkatan kualitas Pembiayaan koperasi

Tabel 2.5
Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Meningkatnya koperasi dan usaha mikro dan Meningkatnya Ketersediaan kesempatan kerja

No	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program Renstra	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-						Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun Ke-				Persentase Capaian Pada Tahun Ke- (%)			
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Pertumbuhan koperasi Aktif	%	-4,76	0,43	0,43	0,85	0,85	0,85	- 4,76	0,10	7,75	3,94	100	23,26	1802,33	463,53
2	Pertumbuhan Usaha Mikro (UM)	%	0,52	0,18	0,18	0,21	0,25	0,28	0,52	0,20	0,18	0,83	100	111,11	100	395,24
3	Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berdasarkan pendaftar pelatihan	%	57,10	50,00	50,00	50,00	64,00	64,00	42,19	57,00	75	38	73,89	114	150	76
4	Persentase calon transmigran yang diberangkatkan	%	0	50	50	50	50	100	100	100	0	20	100	200	0	40

Kondisi Koperasi/KUD di Kabupaten Pekalongan mengalami penurunan yang ditahun 2020 sebanyak 623 unit menjadi sebesar 591 unit pada tahun 2024 kondisi tersebut disebabkan adanya regulasi Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 15 Tahun 2015 Pasal 4 bahwa Koperasi USP yang memiliki modal tetap paling sedikit Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dapat mengajukan permohonan izin usaha sedangkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 Pasal 8 untuk penerbitan ijin usaha memiliki modal tetap paling sedikit Rp 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) untuk wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota. Koperasi tidak aktif dikarenakan keberadaan Koperasi sudah tidak ada, pengurus sudah tidak aktif, tidak melakukan RAT sebagai kewajiban Koperasi. namun demikian kita selalu melakukan pendampingan kepada koperasi yang tidak aktif agar bisa aktif kembali, kegiatan yang dilaksanakan terhadap koperasi yang aktif memberikan Pengawasan dan Pelatihan terhadap Pengurus Koperasi maupun Pengawas Koperasi untuk meningkatkan pengetahuan tentang tata cara pengelolaan perkoperasian, juga dilakukan penilaian Kesehatan Koperasi KSP/USP untuk Tahun 2024 telah melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap 84 Koperasi sedangkan untuk penilaian kesehatan koperasi sebanyak 53 Koperasi, untuk Pelatihan baik Pengurus maupun pengawas koperasi sejumlah 105 orang.

Pada capaian Pertumbuhan Usaha Mikro (UM) tercapai sebesar 0,21% dari target 0,21 dan realisasi sebesar 100 %, jika dibandingkan dengan target akhir jangka menengah (Renstra) menunjukkan capaian kinerja sebesar 100%. Pertumbuhannya usaha di Kabupaten Pekalongan mengalami pasang turun pada Tahun 2024, maka Langkah-langkah yang diambil oleh pihak Dinas dengan memfasilitasi pelaku UMKM untuk Pemberdayaan dan Pelatihan serta bermitra dengan pengusaha yang sudah sukses seperti Indomart dan Alpmart maupun gerai- gerai yanag ada diperhotelan di Jawa Tengah. Usaha Mikro yang telah kita berikan fasilitas Pelatihan dan Kemasan serta Pemasaran sebanyak 145 di Tahun 2024, serta program pengembangan yang bermitra sejumlah 325 UMK. artinya pertumbuhan koperasi aktif sebesar 3.94 % dan pertumbuhan usaha mikro sebesar 0,21%.

Dalam pencapaian indikator sasaran meningkatnya Koperasi dan usaha mikro terdapat hambatan Koperasi yang tidak aktif sulit di ketahui keberadaanya karena Pengurus nya sudah ada yang meninggal maupun pindah alamat, untuk 2023 kami telah mengajukan penghapusan Koperasi yang tidak aktif sebanyak 53 koperasi, untuk Tahun 2024 masih dalam proses analisa untuk pengajuan penghapusan Koperasi.

Usaha Mikro di Kabupaten sangat pesat sekali sehingga kami kurang mengetahui keberadaan pelaku usaha mikro karena kebanyakan mereka belum mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB)

tersebut digunakan untuk mengetahui jumlah UMKM yang ada di Kabupaten Pekalongan. Untuk usaha Mikro dengan mensosialisasikan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB).

b. Tenaga Kerja meliputi :

- 1) Program Perencanaan Tenaga Kerja,
- 2) Program Pelatihan Kerja,
- 3) Program Penempatan Tenaga Kerja,
- 4) Program Hubungan Industrial,
- 5) Program Pembangunan Kawasan transmigrasi, dan
- 6) Pelatihan Kerja Dan Produktifitas Tenaga Kerja.

Secara umum capaian indikator kinerja pada Sasaran Meningkatnya Ketersediaan kesempatan kerja, rata – rata capaian kinerja menunjukkan capaian sebesar 88 % tercapai dengan kategori **Baik** jika dibandingkan dengan rata – rata target akhir jangka menengah (Renstra) sudah menunjukkan capaian kinerja sebesar 84,21 % tercapai dengan kategori **Baik**.

1. Capaian Indikator sebesar 76 % dari Target 50 % dan Realisasi 38 % Adapun jumlah pendaftar pelatihan sejumlah 637 dan jumlah pendaftar yang mendapat pelatihan sejumlah 240.

Realisasi Tahun 2024 jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 37 % hal ini dikarenakan jumlah bidang pencari kerja yang dibutuhkan

berbeda dengan bidang kebutuhan tenaga kerja yang ada. Sehingga pelatihan itu diberikan kepada pencari kerja yang bidangnya sesuai dengan lapangan pekerjaan yang dibutuhkan.

Tabel 2.6
Pencari Kerja yang Mendapat Pelatihan Tahun 2024

No.	Jenis Pelatihan	Jumlah Peserta
1	Fillet Welder SMAW 2F / PB	16
2	Pemasangan Instalasi Listrik Bangunan Sederhana	16
3	Pemeliharaan kendaraan ringan system injeksi	16
4	Barista	16
5	Penjahit pakaian Wanita dewasa	16
6	Pembuatan roti dan kue	16
7	Teknik instalasi tenaga	16
8	Pengelola administrasi perkantoran	16
9	Multimedia	16
10	Front Office resepsionis	16
11	Menjahit dengan mesin lock stich	16
12	Practical office advance	16
13	Barber	16

No.	Jenis Pelatihan	Jumlah Peserta
14	Handycraft Bambu	16
15	Merias wajah dan menata rambut	16
TOTAL		240

2. Pelaksanaan Pengiriman Calon Transmigrasi ke Lokasi Transmigrasi

Capaian Indikator sebesar 100 % dari Target 20 % dan Realisasi 20 % Adapun jumlah pendaftar transmigrasi sejumlah 1 KK dan jumlah yang diberangkatkan Transmigrasi sejumlah 1 KK. Ditempatkan diwilayah transmigrasi yaitu Desa Kahingai Kecamatan Belantikan Raya Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah.

Capaian ini didukung oleh program pemerintah kabupaten pekalongan pada OPD yaitu Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Penyuluhan Program Transmigrasi Kepada Calon Transmigran.

Alokasi perpindahan dan penempatan transmigrasi nasional sebanyak 121 KK dan Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 sebesar 16 KK, Dimana untuk Kabupaten Pekalongan mendapatkan alokasi perpindahan dan penempatan transmigrasi sejumlah 1 KK.

2.1.3. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan adalah pelaku koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta Masyarakat di wilayah Kabupaten Pekalongan meliputi :

a) **Urusan Koperasi**

Memberikan pelayanan pembinaan dan pengawasan kesehatan koperasi, pendirian koperasi dan fasilitasi pembuatan Nomor Induk Koperasi (NIK) serta penanganan koperasi bermasalah.

b) **Urusan UMKM**

Memberikan fasilitasi pelayanan legalitas, pembinaan, pendampingan dalam hal Pelatihan, Pembiayaan, Kelembagaan, Sumber Daya Manusia serta Pemasaran bagi pelaku usaha mikro.

c) **Urusan Tenaga Kerja dan Transmigrasi**

Memberikan Fasilitasi Pelatihan, Penempatan bagi pencari kerja, Pembinaan dan Pengembangan Hubungan Industrial serta Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Penyuluhan Program Transmigrasi Kepada Calon Transmigran.

1.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

1.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan yang dihadapi Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan berdasarkan kinerja pelayanan adalah sebagai berikut:

1. **Sekretariat**

- a. Kurangnya Pendidikan dan pelatihan dalam pengembangan kompetensi ASN
 - b. Kurangnya SDM yang berkompeten.
 - c. Masih terdapat kesenjangan antara jumlah SDM dengan kegiatan pelayanan.
 - d. Sarana penunjang kegiatan yang masih belum memadai
2. Bidang Koperasi
- a. Kurangnya kesadaran pengurus koperasi untuk mengurus ijin.
 - b. Banyaknya koperasi yang belum menerapkan prinsip perkoperasian.
 - c. SDM yang tidak terlatih dan berkompeten dalam mengelola koperasi di Kabupaten Pekalongan.
 - d. Pelaku usaha mikro baru masih belum memahami cara mendapatkan modal dan pemasaran yang optimal, pelaku usaha mikro hanya berfokus pada produksi saja.
3. Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- a. Belum semua koperasi simpan pinjam/USP Koperasi mengurus ijin kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas
 - b. rendahnya jumlah koperasi aktif di Kabupaten Pekalongan karena banyaknya jumlah koperasi yang didirikan hanya untuk mendapatkan badan hukum agar mendapatkan bantuan
 - c. rendahnya jumlah KSP/USP Koperasi sehat di Kabupaten Pekalongan
 - d. rendahnya kompetensi SDM pengawas, pengurus dan pengelola koperasi di Kabupaten Pekalongan

- e. rendahnya jumlah koperasi yang mendapatkan fasilitasi pembiayaan
 - f. Kurangnya pengalaman dari para pelaku usaha mikro baru, terkendalanya permodalan dan pemasaran produk yang dihasilkan
 - g. Belum optimalnya persentase Usaha Mikro Kecil terhadap jumlah UMKM, masih terdapat 16,61% yang belum optimal
4. Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
- a. Masih rendahnya tingkat penyerapan tenaga kerja dikarenakan *mismatch* antara keterampilan pencari kerja dengan kebutuhan tenaga kerja di perusahaan
 - b. Masih kurangnya tenaga kerja yang belum memiliki skil. Hal ini disebabkan oleh tenaga kerja yang tidak mengikuti pelatihan atau peningkatan kompetensi.
 - c. Masih kurangnya tenaga kerja yang berkompetensi sehingga berpengaruh pada penyerapan tenaga kerja. Hal ini disebabkan karena pencari kerja yang tidak memiliki keahlian tidak dapat masuk ke dunia kerja yang menyaratkan memiliki keahlian atau kompetensi.
 - d. Masih kurangnya Informasi pasar kerja yang digunakan oleh pencari kerja.
 - e. Kurangnya kesempatan kerja yang diminati pencari kerja karena tidak sesuai dengan kemampuan/skil pencari kerja
 - f. Masih adanya CPMI yang illegall
 - g. Belum seluruh pekerja di ikutkan jaminan sosial (BPJS NAKER DAN BPJS KESEHATAN)
 - h. Masih adanya perusahaan yang belum menyusun struktur dan skala upah

- i. masih adanya perusahaan yang belum membuat PP/PKB dan belum disahkan kedinas
- j. LKS bipartit belum dijalankan PP/PKB diperusahaan
- k. Belum adanya pemahaman mengenai manfaat PP/PKB di perusahaan
- l. Adanya PHK yang tidak sesuai ketentuan perundang-undangan
- m. Adanya pelanggaran hak dan kewajiban dalam pelaksanaan hubungan industrial
- n. Terbatasnya kuota transmigran dari pemerintah pusat dan provinsi.

Tabel 2.7
Pemetaan Permasalahan

Aspek	Kondisi Rill	Kondisi Ideal	Kesenjangan
Koperasi	Keterbatasan SDM di bidang koperasi, sehingga kinerja bidang koperasi belum dapat optimal	SDM terpenuhi sesuai dengan ketentuan/ anjab bidang koperasi dengan jumlah koperasi binaan yang ada di Kabupaten Pekalongan	Penambahan SDM bidang koperasi masih belum memenuhi standar ideal.
UMKM	Terbatasnya jumlah SDM, sarana dan prasarana penunjang kegiatan maupun pembinaan dan pendampingan	Sarana dan prasarana penunjang kegiatan pembinaan dan pendampingan terhadap pelaku usaha yang memadai dan	Ketersediaan sarana dan prasarana serta SDM yang masih terbatas belum memenuhi kebutuhan

Aspek	Kondisi Rill	Kondisi Ideal	Kesenjangan
	terhadap pelaku usaha mikro	modern	pendampingan pelaku usaha mikro
Tenaga Kerja	Masih terbatasnya kuantitas SDM	Kuantitas SDM terpenuhi	Kuantitas SDM terbatas
	Kompetensi ASN perlu diupgrade secara berkala	ASN berkompeten	Kompetensi ASN belum upgrade
Sekretariat	Masih terbatasnya Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kebutuhan kinerja dan pelayanan kepegawaian	Sarana dan prasarana penunjang sudah memadai dan modern, mendukung efisiensi dan efektivitas kerja.	Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang yang masih terbatas tidak memenuhi standar ideal.

1.2.2. Isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Berkaitan dengan peran Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terutama dalam memberikan pelayanan sesuai kewenangannya. Isu strategis yang harus diselesaikan oleh Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja dirumuskan melalui penelaahan terhadap kinerja pelayanan Dinas Koperasi UKM dan

Tenaga Kerja, penelaahan visi dan misi kepala daerah, penelaahan terhadap sasaran-sasaran strategis kementerian dan perangkat daerah provinsi. Berdasarkan analisis tersebut, isu strategis yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya kesempatan kerja yang didukung oleh kompetensi pekerja sesuai dengan keahliannya.
2. Belum optimalnya kesempatan kerja dari pencari kerja yang ada.
3. Rendahnya koperasi berkualitas di Kabupaten Pekalongan.
4. Belum optimalnya peran dan partisipasi UKM Binaan dalam mendorong perekonomian daerah.

Tabel 2.8

Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan Dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
Unggulan sektor industri kecil menengah (batik, jeans, sarung); pertanian dan perdagangan	• Belum optimalnya daya saing dan produktivitas perekonomian daerah • Belum optimalnya pertumbuhan dan kontribusi sektorsektor unggulan perekonomian daerah • Rendahnya daya saing tenaga kerja • Belum	• Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi akibat kualitas tenaga kerja, penurunan kontribusi pariwisata, dan industry manufaktur • Ancaman terhadap ekosistem alam,	• Kemiskinan • Pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja • Perubahan iklim	• Isu ekonomi: rendahnya produktivitas, produktivitas tenaga kerja relatif tertinggal, pembangunan belum sepenuhnya menerapkan prinsip berkelanjutan, infrastruktur dan literasi digital masih terbatas, belum optimalnya	• Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan • Penurunan tingkat kemiskinan • Keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta penanggulangan bencana • Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia	Optimalisasi potensi ekonomi lokal didukung pengembangan sektor industri kreatif, pariwisata, dan UMKM untuk meningkatkan daya saing daerah serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pekalongan

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan Dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
	optimalnya penyediaan prasarana dan sarana pendukung perekonomian daerah	kerusakan lingkungan , dan keberlanjutan sumber daya alam termasuk Kawasan pesisir		Isu kesinambungan pembangunan: konsistensi perencanaan penganggaran , konsisten perencanaan pusat daerah, kapasitas pembiayaan terbatas		

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan

Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan Pemerintahan Daerah dalam mendukung pelaksanaan misi, untuk mewujudkan Visi pembangunan Kabupaten Pekalongan dalam kurun waktu 2025-2029. Dalam rangka mewujudkan kebijakan RPJMD tahun 2025 – 2029, maka tujuan pembangunan jangka menengah Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja yaitu Meningkatkan kontribusi sektor PDRB dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan dan Meningkatkan kinerja BUMD dan investasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan Meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan pengurangan pengangguran di masyarakat dan Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program transmigrasi untuk mendukung pengurangan kemiskinan.

1.2 Sasaran

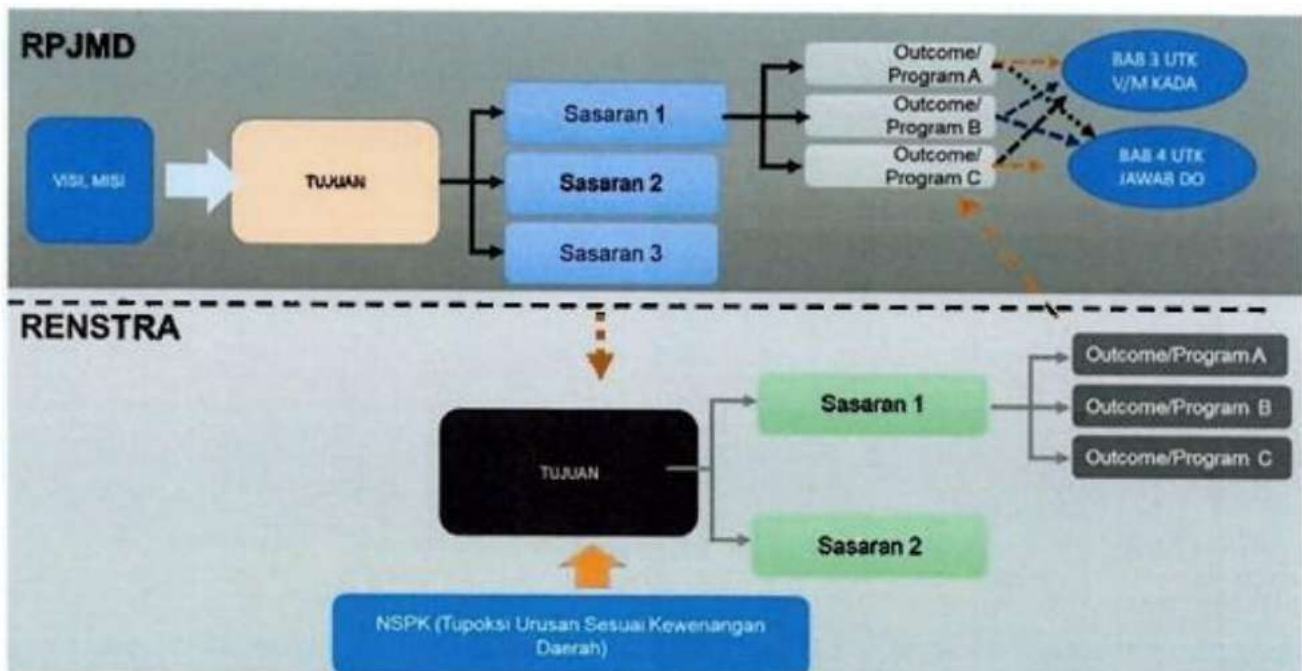
Untuk memastikan pencapaian tujuan yang diharapkan, maka perlu ditetapkan sasaran jangka menengah. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Sasaran jangka menengah Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja dijabarkan sebagai berikut:

1. Meningkatnya Koperasi Aktif KSP/USP Koperasi yang Keanggotaannya dalam daerah Kabupaten/Kota
2. Meningkatnya pertumbuhan usaha mikro
3. Meningkatnya proporsi penduduk usia kerja yang berpartisipasi dalam angkatan kerja
4. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam program transmigrasi untuk mendukung pengurangan kemiskinan

5. Meningkatnya tata kelola kualitas Pemerintah Daerah di Dinkop UKM dan Naker Kab. Pekalongan

Berikut rumusan rangkaian pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja sebagaimana dihasilkan pada tahapan Perumusan Tujuan dan Sasaran Pelayanan Jangka Menengah, disajikan dalam tabel 3.1.

Gambar 3.1. Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD



Tabel 3.2 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Kondisi Awal	Target Tahun						
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ket.
Meningkatnya perekonomian daerah yang inklusif dan berkelanjutan dengan mendorong penguatan UMKM, peningkatan produktivitas sektor unggulan, pemerataan ekonomi di Kabupaten Pekalongan	Meningkatkan kontribusi sektor PDRB dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan dan Meningkatkan kinerja BUMD dan investasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan Meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan pengurangan pengangguran di masyarakat dan Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program transmigrasi untuk mendukung pengurangan kemiskinan		Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	0,94	1,18	1,44	1,71	1,97	2,23	2,49	
			Rasio Kewirausahaan Daerah	n/a	4,66	5,03	5,40	5,77	6,14	6,51	
			Rasio Produktivitas Tenaga Kerja	n/a	52,61	52,65	52,70	52,75	52,80	52,85	
			Persentase pemenuhan kuota transmigrasi yang diberangkatkan	100	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya Koperasi Aktif	Persentase Koperasi Aktif	6,58	237,65	0,54	0,72	0,90	1,07	1,23	
		Meningkatnya pertumbuhan usaha mikro	Rasio Pertumbuhan Usaha Mikro	14,61	9,32	9,46	9,51	9,70	9,84	9,87	
		Meningkatnya proporsi penduduk usia kerja yang berpartisipasi dalam angkatan kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	70,63	70,89	71,07	71,26	71,46	71,67	71,89	

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Kondisi Awal 2024	Target Tahun						Ket.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam program transmigrasi untuk mendukung pengurangan kemiskinan	Presentase transmigran yang diberangkatkan	100	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya tata kelola kualitas Pemerintah Daerah di Dinkop	Nilai Sakip Perangkat Daerah	63,65	65,00	68,00	70,00	75,00	78,00	80,00	
		UKM dan Naker Kab. Pekalongan	Nilai IKM Perangkat Daerah	86,98	87,99	89,00	90,50	92,60	94,87	98,89	

1.3 Strategi

Selanjutnya diuraikan rangkaian rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja dalam lima tahun mendatang. Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Bahwa berdasarkan visi misi kepala daerah terpilih periode 2025-2029 sebagai berikut :

Visi : Kabupaten Pekalongan Maju, Adil, dan Sejahtera

**Misi III : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang
Inklusif dan UKM yang berdaya saing.**

Strategi yang akan dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja dalam rangka mencapai sasaran jangka menengah adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Koperasi
2. Meningkatkan pertumbuhan usaha mikro
3. Meningkatkan proporsi penduduk usia kerja yang berpartisipasi dalam angkatan kerja
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program transmigrasi untuk mendukung pengurangan kemiskinan
5. Meningkatkan tata kelola kualitas Pemerintah Daerah di Dinkop UKM dan Naker Kab. Pekalongan

Tabel 3.3 Pentahapan Renstra PD

Tahap I (2026) (1)	Tahap II (2027) (2)	Tahap III (2028) (3)	Tahap IV (2029) (4)	Tahap V (2030) (5)
Sinergitas Pembangunan Sektor Koperasi, UMKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui Transformasi: Memacu Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Penguatan Ekosistem UMKM	Pembangunan dan pemerataan sarana dan prasarana Koperasi, Usaha Mikro dan tenaga kerja guna peningkatan pelayanan publik	Penguatan Ketahanan Koperasi, Usaha Mikro dan tenaga kerja melalui Inovasi program dan layanan yang berorientasi pada Keberlanjutan Pembangunan daerah	Peningkatan Kualitas dan daya saing Koperasi, Usaha Mikro dan tenaga kerja serta pengembangan sumber daya manusia yang berorientasi pada terwujudnya SDM Unggul dan Berdaya Saing Global	Pembangunan Koperasi, Usaha Mikro dan tenaga kerja yang seimbang, berkelanjutan serta memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pekalongan

1.4 Arah Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang diambil oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut.

Keselarasan antara tujuan, sasaran dengan strategi dan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja.

Strategi yang digunakan dengan menggunakan analisa swot adalah sebagai berikut :

1. Kekuatan (strength)

Kekuatan adalah memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya. Kekuatan Pengembangan Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja

dalam 5 (lima) tahun ke depan antara lain sebagai berikut:

1. Memberikan pelatihan kerja kepada pencari kerja
2. Banyaknya jumlah koperasi yang tidak aktif
3. Jumlah SDM pengelola koperasi yang tidak kompeten
4. Pemahaman dan pengetahuan pengurus, pengawas dan anggota tentang perkoperasian masih minim
5. Fasilitasi dan akses pembiayaan untuk koperasi masih kurang.
6. Ada daerah kantong TKI
7. Adanya BLK sebagai tempat pelatihan ketrampilan sesuai dengan dunia kerja.

2. Kelemahan (weakness)

Strategi yang ditetapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada. Kelemahan dalam pengembangan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Menengah dan Tenaga Kerja antara lain sebagai berikut dalam 5 (lima) tahun ke depan antara lain sebagai berikut :

1. Tidak ada sanksi wajib lapor perusahaan atau tidak ada regulasi.
2. Munculnya percaloan tenaga kerja.
3. Adanya tindakan penipuan dan kekerasan pada tenaga kerja(human trafficking).

3. Peluang (opportunities)

Peluang adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari luar organisasi (eksternal) dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi dimasa depan. Peluang dalam pengembangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga

Kerja dalam 5 (lima) tahun ke depan antara lain sebagai berikut:

1. Mengikuti pelatihan kompetensi
2. Menciptakan lapangan kerja baru
3. Membina koperasi agar aktif
4. Memberikan fasilitasi diklat peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian
5. memberikan sosialisasi tentang regulasi perkoperasian.

4. Ancaman (threatss)

Ancaman adalah Strategi yang ditetapkan berdasarkan kekuatan yang dimiliki organisasi untuk mengatasi ancaman dalam pengembangan dalam 5 (lima) tahun ke depan antara lain sebagai berikut :

1. Perusahaan yang berdampak covid sehingga karyawan banyak dirumahkan
2. Dampak globalisasi terhadap peningkatan jumlah tenaga kerja asing.

Tabel 3.4. Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD

No	Oprasional NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		Mendorong peningkatan permodalan lembaga keuangan mikro dan koperasi simpan pinjam untuk memperluas kapasitas pemberian kredit kepada sektor produktif.	Meningkatkan permodalan koperasi simpan pinjam dalam rangka pengembangan usaha koperasi, manajemen usaha dan keuangan koperasi.	Koperasi dan UKM
2		Membangun kemitraan lintas sektor dengan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk memperkuat sistem pangan.	Memperkuat sistem pangan melalui koperasi sektor rill.	Koperasi dan UKM
3		Memberikan dukungan dan pelatihan kewirausahaan bagi pemuda, menciptakan inkubator bisnis dan ruang kreatif, serta menyelenggarakan kompetisi kewirausahaan untuk mengasah kreativitas pemuda.	Meningkatkan pengembangan SDM Koperasi melalui pelatihan dan pendidikan perkoperasian	Koperasi dan UKM
4		Membentuk inkubator bisnis untuk memberikan fasilitas dan pendampingan bagi wirausahawan baru, serta menyediakan pelatihan kewirausahaan yang fokus pada pengembangan ide bisnis dan akses pasar bagi pemuda dan masyarakat yang ingin memulai usaha.	Meningkatkan pengembangan SDM koperasi melalui incubator bisnis pada koperasi baik KSP / Koperasi Sektoril	Koperasi dan UKM
5		Mendukung perempuan melalui bantuan modal usaha, pelatihan kewirausahaan, dan pengembangan koperasi berbasis UMKM lokal.	Meningkatkan SDM koperasi khususnya perempuan melalui pengembangan perkoperasian	Koperasi dan UKM
6		Meningkatkan produktivitas dan daya saing industri batik sebagai produk unggulan daerah.	Meningkatkan kapasitas SDM, dan Standar mutu produk serta pengembangan Inovasi bagi Pelaku UMKM Batik	Koperasi dan UKM

No	Oprasional NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7		Memperkuat peran UMKM dan koperasi sebagai tulang punggung ekonomi lokal.	Meningkatkan pendapatan UMKM dan Koperasi melalui pemberdayaan kewirausahaan dan pembinaan koperasi	Koperasi dan UKM
8		Penyediaan akses permodalan, pelatihan kewirausahaan, dan penguatan manajemen usaha bagi pelaku UMKM dan koperasi.	Meningkatkan pengembangan permodalan koperasi melalui pengembangan kerjasama usaha dan pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi koperasi	Koperasi dan UKM
9		Fasilitasi pemasaran produk UMKM melalui kemitraan dan jaringan distribusi.	Meningkatkan akses pemasaran usaha mikro melalui kegiatan bazaar, Expo dan Pengembangan Jaringan kemitraan UMKM.	Koperasi dan UKM
10		Menyediakan akses kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di desa untuk mendapatkan fasilitas pelatihan, modal usaha, serta pembinaan dalam aspek manajerial dan pemasaran.	Memberikan Fasilitasi Pelatihan kepada Usaha Mikro dibidang Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi.	Koperasi dan UKM
11		Menyelenggarakan program edukasi keuangan bagi masyarakat, dengan fokus pada pentingnya manajemen keuangan, penggunaan produk keuangan yang aman, dan cara mengakses pembiayaan untuk sektor produktif.	Meningkatkan kualitas SDM koperasi melalui edukasi system keuangan yang berbasis akuntabel, transparan dan terpercaya.	Koperasi dan UKM
12		Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat dan risiko layanan keuangan melalui berbagai media dan program yang mudah diakses.	Meningkatkan kualitas SDM masyarakat dalam menggunakan jasa keuangan yang ditawarkan oleh koperasi	Koperasi dan UKM
13		Mengembangkan skema penjaminan kredit yang dapat mengurangi risiko	Meningkatkan kualitas SDM masyarakat dalam	Koperasi dan UKM

No	Oprasional NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		bagi lembaga keuangan daerah dalam memberikan pembiayaan kepada sektor produktif, terutama UMKM.	menggunakan jasa keuangan yang ditawarkan oleh koperasi	
14		Memberikan pelatihan dan pendampingan untuk pengelola UMKM di bidang manajerial, pemasaran, dan keuangan, serta memfasilitasi akses pembiayaan dengan bunga rendah untuk memperkuat kapasitas UMKM dalam menciptakan lapangan kerja.	Meningkatkan kualitas SDM koperasi melalui pendidikan dan pelatihan perkoperasian	Koperasi dan UKM
15		Meningkatkan kerjasama dengan lembaga penjaminan kredit nasional untuk memastikan terlaksananya program penjaminan yang efektif dan efisien.	Meningkatkan kerjasama koperasi dengan lembaga pihak ketiga agar mampu memberikan pinjaman kepada masyarakat.	Koperasi dan UKM
16		Menyelenggarakan pelatihan keterampilan berbasis kebutuhan pasar kerja di sektor sektor unggulan.	Meningkatkan keterampilan tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja	Tenaga Kerja
17		Menyediakan pelatihan dan pengembangan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar dan teknologi, serta menyediakan program pendidikan vokasi dan sertifikasi.	Menyelenggarakan pelatihan keterampilan yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan pasar kerja dan teknologi	Tenaga Kerja
18		Mengembangkan pelatihan keterampilan berbasis potensi lokal dengan memastikan keterlibatan setara antara perempuan dan laki-laki.	Meningkatkan kesetaraan gender dalam akses dan partisipasi pelatihan keterampilan	Tenaga Kerja
19		Menyusun kebijakan yang fokus pada pemberian pelatihan dan pengembangan keterampilan kepada masyarakat desa,	Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat desa dalam bidang pertanian, industri kreatif,	Tenaga Kerja

No	Oprasional NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		terutama dalam bidang pertanian, industri kreatif, kewirausahaan, dan teknologi.	kewirausahaan, dan teknologi.	
20		Peningkatan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, lembaga pendidikan, dan institusi pelatihan vokasional untuk merancang dan menyelenggarakan program pelatihan yang relevan dengan kebutuhan industri dan perkembangan pasar kerja	Pembentukan forum komunikasi antara BLK dengan Perusahaan (FKLPID) dalam rangka kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, lembaga pendidikan, dan institusi pelatihan vokasional.	Tenaga Kerja
21		Menyusun kebijakan insentif bagi investor yang berencana berinvestasi di sektor manufaktur dan pengolahan produk lokal, yang memiliki potensi besar dalam menciptakan lapangan kerja.	Meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan industri dan perkembangan pasar kerja, meningkatkan keterampilan lulusan untuk lebih siap menghadapi dunia kerja dan meningkatkan kerjasama antara lembaga pendidikan dan industri.	Tenaga Kerja
22		Mendorong kerja sama dengan lembaga pendidikan untuk memperbarui kurikulum dengan pendekatan berbasis keterampilan, serta meningkatkan program magang di perusahaan untuk memberikan pengalaman langsung kepada pelajar dan mahasiswa, sehingga mereka lebih siap menghadapi dunia kerja.	Penyelarasan antara dunia usaha, dunia industri dunia kerja (DUDIKA) melalui pembinaan terhadap bursa kerja khusus (BKK) di SMK/SMA dan Universitas.	Tenaga Kerja
23		Mengembangkan platform digital untuk mempermudah masyarakat mengakses informasi lowongan pekerjaan di Kabupaten Pekalongan, serta menyelenggarakan <i>job</i>	Penyediaan layanan sistem informasi ketenagakerjaan kabupaten pekalongan (SIGAP) untuk pendaftaran kartu pencari kerja dan penyebarluasan	Tenaga Kerja

No	Oprasional NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		<i>fair</i> rutin dan bekerja sama dengan lembaga penyedia tenaga kerja untuk mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan.	informasi pasar kerja serta penyelenggaraan pameran bursa kerja (<i>Job Fair</i>)	
24		Pemetaan calon peserta transmigran potensial	Penyuluhan Program Transmigrasi Kepada Calon Transmigran	Transmigrasi
25		Peningkatan kapasitas calon transmigran	Fasilitasi Pelatihan bagi calon transmigran	Transmigrasi

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan dan Subkegiatan Penyelenggaraan Bidang Urusan

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah implementatif yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2025-2029) meliputi program, kegiatan, sub kegiatan beserta indikator kinerja beserta target dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Kabupaten Pekalongan

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja menetapkan program-program yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan. Perencanaan program, kegiatan dan sub-kegiatan dilakukan dengan berpedoman pada program pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Pekalongan, antara lain sebagai berikut :

1 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM

Kegiatan Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

Subkegiatan Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

2 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI

Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota

Subkegiatan Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota

3 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI

Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Subkegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

4 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang keanggotaannya dalam daerah Kabupaten/Kota

Subkegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi

5 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
Kegiatan Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah Kabupaten/Kota

Subkegiatan Peningkatan Produktivitas Nilai Tambah Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha.

6 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan

Subkegiatan Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro

Subkegiatan Fasilitas kemudahan perizinan Usaha Mikro

Subkegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro

Subkegiatan Koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan Usaha Mikro

7 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil

Subkegiatan Pengembangan Usaha Mikro

Subkegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi

8 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA
Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)

Subkegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro

9 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi

Subkegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan

Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi

Subkegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi

Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

Subkegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

Kegiatan Konsultasi Produktifitas Pada Perusahaan Kecil

- Subkegiatan Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas Kepada Perusahaan Kecil
- Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi**
- Subkegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan vokasi bagi pencari kerja berdasarkan unit kompetensi
- 10 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**
- Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**
- Subkegiatan Job Fair/Bursa Kerja
- Subkegiatan Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online
- Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota**
- Subkegiatan Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran
- 11 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**
- Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**
- Subkegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan
- Subkegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan
- Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**
- Subkegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Subkegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota
- Subkegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja
- 12 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**
- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
- Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**
- Subkegiatan Penyuluhan Program Transmigrasi Kepada Calon Transmigran Penduduk Asal
- 13 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
- Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
- Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Subkegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Subkegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Subkegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Subkegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu

Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Subkegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).

1. Indikator Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
2. Indikator Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.

3. Indikator Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.

Indikator tujuan dan sasaran yang dipilih idealnya adalah pada skala indikator Dampak (*impact*) minimal Hasil (*outcome*). Indikator program yang dipilih idealnya pada skala Hasil (*outcome*), dan untuk indikator kegiatan yang dipilih idealnya adalah pada skala Keluaran (*output*).

Tabel 4.1
Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan 1	Tujuan 2	Sasaran 3	Outcome 4	Output 5	Indikator 6	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan 7	Ket. 8
Meningkatnya perekonomian daerah yang inklusif dan berkelanjutan dengan mendorong penguatan UMKM, peningkatan produktivitas sektor unggulan, pemerataan ekonomi di Kabupaten Pekalongan	Meningkatkan kontribusi sektor PDRB dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan dan Meningkatkan kinerja BUMD dan investasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan Meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan pengurangan pengangguran di masyarakat dan Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program transmigrasi untuk mendukung pengurangan kemiskinan				Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB		
					Rasio Kewirausahaan Daerah		
					Rasio Produktivitas Tenaga Kerja		
					Persentase pemenuhan kuota transmigrasi yang diberangkatkan		
		Meningkatnya Koperasi Aktif			Persentase Koperasi Aktif		

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
			Meningkatnya legalitas usaha simpan pinjam koperasi		Persentase fasilitas penerbitan ijin usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	
				Terbitnya Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
				Terfasilitasinya Pemenuhan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
			Meningkatnya kepatuhan koperasi terhadap prinsip tata kelola yang sehat dan regulasi yang berlaku		persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan oleh koperasi	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	
				Terlaksananya Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	
				Terlaksananya proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	
			Meningkatnya kinerja dan keberlanjutan usaha KSP/USP koperasi		Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	
				Terlaksananya Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia koperasi dalam pengelolaan usaha		persentase koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	
				Terlaksananya Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang keanggotaannya dalam daerah Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	
			Meningkatnya kemandirian koperasi		persentase koperasi yang meningkat	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
					omsetnya	KOPERASI	
				Meningkatnya Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, Restrukturisasi Usaha		Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Peningkatan Produktivitas Nilai Tambah Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha.	
		Meningkatnya pertumbuhan usaha mikro			Rasio Pertumbuhan Usaha Mikro		
			Meningkatnya kapasitas dan keberlanjutan usaha UMKM		Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
			dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan penciptaan lapangan kerja			MIKRO (UMKM)	
				Terlaksananya Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	
				Terfasilitasinya Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	
				Terfasilitasinya Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang memperoleh fasilitasi kemudahan perizinan usaha mikro	Fasilitas kemudahan perizinan Usaha Mikro	
				Terfasilitasinya Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Koodinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan Usaha Mikro	
			Meningkatnya akses pasar, pembiayaan, teknologi, dan inovasi bagi UMKM dalam rangka peningkatan produktivitas		persentase pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	
				Berkembangnya Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	
				Terfasilitasinya Usaha Mikro Menjadi Usaha Menengah Melalui Pendampingan, Kemitraan, Perluasan Pasar, Akses Pembiayaan dan Investasi, Pengembangan SDM, dan/Kegiatan	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Pengembangan Usaha Mikro	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Lainnya			
				Terfasilitasinya Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	
		Meningkatnya proporsi penduduk usia kerja yang berpartisipasi dalam angkatan kerja			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)		
			Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengambilan kebijakan tenaga kerja yang efektif		Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	
				Tersusunnya rencana tenaga kerja makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	
				Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
			Meningkatnya kompetensi dan daya saing tenaga kerja		Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	
				Terlaksananya pendidikan dan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi (DBHCHT)		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	
				Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	
				Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	
				Terbinanya lembaga pelatihan kerja swasta		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	
				Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Pelaksanaan konsultasi produktivitas kepada perusahaan kecil		Konsultasi Produktifitas Pada Perusahaan Kecil	
				Terlaksananya Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	Pelaksanaan Konsultasi Produktifitas Kepada Perusahaan Kecil	
			Meningkatnya kesempatan kerja bagi calon tenaga kerja		Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar kerja dalam wilayah Kabupaten/kota	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	
				Terlaksananya Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	
				Terlaksananya Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang terdaftar dalam Pasar Kerja melalui Sistem Online	Job Fair/Bursa Kerja	
				Tersedianya Data dan Informasi Pencari Kerja yang Memanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Pasar Kerja Online		
				Tersedianya Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	
			Meningkatnya kualitas hubungan industrial antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah		Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	
					Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)		
				Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Pengusaha		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Jumlah Perusahaan yang mendapatkan pembinaan pembuatan dan pengesahan PP serta pendaftaran PKB	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	
				Terselenggaranya Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	
				Terlaksananya operasional lembaga kerja sama tripartit daerah kabupaten/kota		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampa	Jumlah perusahaan yang telah dilakukan pembinaan dan pencegahan perselisihan	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				k pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
				Terlaksananya Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam program transmigrasi untuk mendukung pengurangan kemiskinan			Presentase transmigran yang diberangkatkan		
			Meningkatnya kesiapan calon transmigran		Persentase calon transmigrasi terdaftar yang mendapatkan pembinaan	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Calon Transmigran Penduduk Asal yang Mendapatkan Penyuluhan	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Penyuluhan Program Transmigrasi kepada Calon Transmigran Penduduk Asal	Jumlah Calon Transmigran Penduduk Asal yang Mendapatkan Penyuluhan	Penyuluhan Program Transmigrasi Kepada Calon Transmigran Penduduk Asal	
		Meningkatnya tata kelola kualitas Pemerintah Daerah di Dinkop UKM dan Naker Kab. Pekalongan				Nilai Sakip Perangkat Daerah	
						Nilai IKM Perangkat Daerah	
			Meningkatnya dukungan administrasi, keuangan, sarana prasarana, serta sumber daya yang efektif dan efisien dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah		Presentase Ketercapaian program penunjang urusan pemerintahan daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Perangkat Daerah			
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah		Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen	Penyediaan Komponen Instalasi	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehab ilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitas i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan 1	Indikator 2	Satuan 3	Baselin e Tahun 2024 3	Target dan Pagu Indikator Tahun									
				Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
				Target 4	Pagu 5	Target 6	Pagu 7	Target 8	Pagu 9	Target 10	Pagu 11	Target 12	Pagu 13
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase fasilitas penerbitan ijin usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam	%	100	100	0	100	25.000.000	100	26.000.000	100	27.000.000	100	27.000.000
Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota							25.000.000		26.000.000		27.000.000		27.000.000
Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan	Unit Usaha	100	100	0	100	25.000.000	100	26.000.000	100	27.000.000	100	27.000.000

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	Baselin e Tahun 2024	Target dan Pagu Indikator Tahun									
				Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
dalam Daerah Kabupaten/Kota	Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/K ota												
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan oleh koperasi	%	100	100	60.000.000	100	40.000.000	100	41.000.000	100	43.000.000	100	44.000.000
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota					60.000.000		40.000.000		41.000.000		43.000.000		44.000.000
Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Unit Usaha	90	90	60.000.000	90	40.000.000	90	41.000.000	90	43.000.000	90	44.000.000
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Meningkatny a Koperasi yang berkualitas	%	100	100	0	100	10.000.000	100	10.000.000	100	11.000.000	100	11.000.000
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit							10.000.000		10.000.000		11.000.000		11.000.000

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	Baselin e Tahun 2024	Target dan Pagu Indikator Tahun									
				Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota													
Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Unit Usaha	100	106	0	113	10.000.000	120	10.000.000	128	11.000.000	137	11.000.000
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	%	100	100	0	100	50.000.000	100	51.000.000	100	53.000.000	100	55.000.000
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang keanggotaannya dalam daerah Kabupaten/Kota					0		50.000.000		51.000.000		53.000.000		55.000.000
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Orang	100	100	0	100	50.000.000	100	51.000.000	100	53.000.000	100	55.000.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang meningkat omsetnya	%	45	55	36.000.000	60	36.000.000	65	37.000.000	70	38.000.000	75	39.000.000

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	Baselin e Tahun 2024	Target dan Pagu Indikator Tahun									
				Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah Kabupaten/Kota					36.000.000		36.000.000		37.000.000		38.000.000		39.000.000
Peningkatan Produktivitas Nilai Tambah Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha.	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Unit Usaha	50	50	36.000.000	50	36.000.000	50	37.000.000	50	38.000.000	50	39.000.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha	%	20	0,023	707.000.000	0,025	687.000.000	0,027	704.000.000	0,028	731.000.000	0,029	753.000.000
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para					707.000.000		687.000.000		704.000.000		731.000.000		753.000.000

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	Baselin e Tahun 2024	Target dan Pagu Indikator Tahun									
				Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Pemangku Kepentingan													
Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Pemberdayaa n melalui kemitraan usaha mikro	Unit Usaha	145	153	380.000.000	157	381.000.000	161	382.000.000	165	383.000.000	170	384.000.000
Fasilitas kemudahan perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang memperoleh fasilitasi kemudahan perizinan usaha mikro	Unit Usaha	45	60	36.900.000	65	36.900.000	70	37.000.000	75	38.000.000	80	39.000.000
Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampinga n Terhadap Usaha Mikro	Unit Usaha	110	150	130.000.000	180	135.000.000	210	140.000.000	240	145.000.000	280	150.000.000
Koodinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaa n Usaha Mikro	Orang	145	145	160.100.000	150	134.100.000	155	145.000.000	160	165.000.000	165	180.000.000
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	persentase pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat	%	50	55	79.000.000	60	79.000.000	65	80.000.000	70	84.000.000	75	86.000.000

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	Baselin e Tahun 2024	Target dan Pagu Indikator Tahun									
				Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	omsetnya												
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil					79.000.000		79.000.000		80.000.000		84.000.000		86.000.000
Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Unit Usaha	385	385	38.500.000	385	38.500.000	385	39.000.000	385	40.000.000	385	41.000.000
Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Unit Usaha	148	90	40.500.000	100	40.500.000	110	41.000.000	120	44.000.000	130	45.000.000
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	100	100	35.000.000	100	35.000.000	100	36.000.000	100	37.000.000	100	38.000.000
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Presentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja (IKK)												

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	Baselin e Tahun 2024	Target dan Pagu Indikator Tahun									
				Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	Dokumen	1	1	35.000.000	1	35.000.000	1	36.000.000	1	37.000.000	1	38.000.000
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi	%	30	31	1.674.000.000	32	1.674.000.000	33	1.716.000.000	34	1.781.000.000	35	1.833.000.000
	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%	40,41	40,52		40,65		40,7		40,75		40,8	
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi					1.619.162.500		1.619.162.500		1.639.987.500		1.661.812.500		1.698.575.000
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Orang	288	288	1.568.951.563	300	1.568.937.500	388	1.579.150.000	400	1.584.850.000	488	1.608.562.500
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	Orang	150	160	50.210.937	170	50.225.000	180	60.837.500	190	76.962.500	200	90.012.500
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta					25.000.000		25.187.500		35.575.000		62.625.000		64.912.500
Pembinaan Lembaga	Jumlah Lembaga	Lembaga	28	30	25.000.000	32	25.187.500	34	35.575.000	36	62.625.000	38	64.912.500

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	Baselin e Tahun 2024	Target dan Pagu Indikator Tahun									
				Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Pelatihan Kerja Swasta	Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina												
Konsultasi Produktifitas Pada Perusahaan Kecil					29.837.500		29.650.000		40.437.500		56.562.500		69.512.500
Pelaksanaan Konsultasi Produktifitas Kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	Perusahaan	20	22	29.837.500	24	29.650.000	26	40.437.500	28	56.562.500	30	69.512.500
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota (IKK)	%	20,22	20,44	165.000.000	20,66	165.000.000	20,77	169.000.000	20,88	176.000.000	20,88	181.000.000
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja					150.000.000		150.000.000		149.000.000		150.000.000		151.000.000
Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Orang	300	300	100.000.000	320	110.000.000	340	115.000.000	360	120.000.000	380	125.000.000
Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi	Jumlah Pencari Kerja yang	Dokumen	12	12	50.000.000	12	40.000.000	12	34.000.000	12	30.000.000	12	26.000.000

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	Baselin e Tahun 2024	Target dan Pagu Indikator Tahun									
				Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Pasar Kerja Online	terdaftar dalam Pasar Kerja melalui Sistem Online												
Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	Orang	50	60	15.000.000	70	15.000.000	80	20.000.000	90	26.000.000	100	30.000.000
Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	Orang	50	60	15.000.000	70	15.000.000	80	20.000.000	90	26.000.000	100	30.000.000
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	27,52	100	325.000.000	100	325.000.000	100	333.000.000	100	346.000.000	100	356.000.000
	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah,	%	100	100		100		100		100		100	

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	Baselin e Tahun 2024	Target dan Pagu Indikator Tahun									
				Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)												
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota													
Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang mendapatkan pembinaan pembuatan dan pengesahan PP serta pendaftaran PKB	Perusahaan	10	8	15.000.000	10	15.000.000	12	20.000.000	14	25.000.000	16	25.000.000
Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Perusahaan	10	8	19.350.000	10	19.350.000	12	20.000.000	14	22.000.000	16	24.000.000

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	Baselin e Tahun 2024	Target dan Pagu Indikator Tahun									
				Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota					290.650.000		290.650.000		293.000.000		299.000.000		302.000.000
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang telah dilakukan pembinaan dan pencegahan perselisihan	Perusahaan	8	9	25.000.000	10	25.000.000	11	35.000.000	12	45.000.000	13	55.000.000
Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Sidang	3	3	15.500.000	3	15.500.000	3	20.000.000	3	20.500.000	3	30.000.000
Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Orang	779	779	250.150.000	779	250.150.000	779	238.000.000	779	233.500.000	779	217.000.000
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase calon transmigrasi terdaftar yang mendapatkan	%	100	100	100.000.000	100	100.000.000	100	103.000.000	100	106.000.000	100	110.000.000

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	Baselin e Tahun 2024	Target dan Pagu Indikator Tahun									
				Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	pembinaan												
Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					100.000.000		100.000.000		103.000.000		106.000.000		110.000.000
Penyuluhan Program Transmigrasi Kepada Calon Transmigran Penduduk Asal	Jumlah Calon Transmigran Penduduk Asal yang Mendapatkan Penyuluhan	Orang	1	25	100.000.000	30	100.000.000	35	103.000.000	40	106.000.000	45	110.000.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Ketercapaian program penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	100	7.249.000.000	100	7.355.000.000	100	7.539.000.000	100	7.825.000.000	100	8.055.000.000
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					12.934.860		14.700.000		17.000.000		19.000.000		30.000.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	12	5.613.160	10	6.700.000	12	8.000.000	12	9.000.000	12	10.000.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	Laporan	12	12	7.321.700	12	8.000.000	12	9.000.000	12	10.000.000	12	20.000.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					4.799.427.880		4.892.000.000		5.095.000.000		5.298.000.000		5.400.000.000

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	Baselin e Tahun 2024	Target dan Pagu Indikator Tahun									
				Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	14	14	4.708.471.000	14	4.800.000.000	14	4.800.000.000	14	5.200.000.000	14	5.300.000.000
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	12	12	90.956.880	12	92.000.000	12	95.000.000	12	98.000.000	12	100.000.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							10.600.000		10.650.000		10.700.000		10.750.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	20	21	10.518.000	22	10.600.000	23	10.650.000	24	10.700.000	25	10.750.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah					246.460.560		266.200.000		285.000.000		297.000.000		325.912.500
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	11.994.000	12	15.000.000	12	20.000.000	12	22.000.000	12	25.000.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	40.399.600	12	45.000.000	12	48.000.000	12	50.000.000	12	60.000.000

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	Baselin e Tahun 2024	Target dan Pagu Indikator Tahun									
				Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	12	35.000.000	12	36.000.000	12	37.000.000	12	38.000.000	12	39.000.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	12	60.000.000	12	61.000.000	12	62.000.000	12	63.000.000	12	64.000.000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	12	10.791.440	12	15.000.000	12	18.000.000	12	20.000.000	12	30.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	80.000.000	12	85.000.000	12	90.000.000	12	93.000.000	12	95.000.000
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12	12	8.275.520	12	9.200.000	12	10.000.000	12	11.000.000	12	12.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.480.000.000		1.510.000.000		1.522.000.000		1.527.000.000		1.533.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan	Laporan	12	12	255.000.000	12	260.000.000	12	262.000.000	12	265.000.000	12	268.000.000

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	Baselin e Tahun 2024	Target dan Pagu Indikator Tahun									
				Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Listrik yang Disediakan												
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	1.225.000.000	12	1.250.000.000	12	1.260.000.000	12	1.262.000.000	12	1.265.000.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					699.658.700		661.500.000		609.350.000		673.300.000		755.337.500
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	12	12	44.995.200	12	45.000.000	12	50.000.000	12	50.500.000	12	60.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	12	12	79.997.400	12	80.000.000	12	85.000.000	12	90.000.000	12	100.000.000
Pemeliharaan Peralatan dan	Jumlah Peralatan	Unit	12	12	54.961.480	12	55.000.000	12	56.000.000	12	57.000.000	12	60.000.000

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	Baselin e Tahun 2024	Target dan Pagu Indikator Tahun									
				Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	18
Mesin Lainnya	dan Mesin Lainnya yang Dipelihara												
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	Unit	5	5	519.704.620	5	481.500.000	5	418.350.000	5	475.800.000	5	535.337.500

Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Meningkatnya legalitas usaha simpan pinjam koperasi	Kegiatan Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota	
			Subkegiatan Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			Subkegiatan Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
2	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Meningkatnya kepatuhan koperasi terhadap prinsip tata kelola yang sehat dan regulasi yang berlaku.	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah	

No (1)	Program Prioritas (2)	Outcome (3)	Kegiatan/Subkegiatan (4)	Ket. (5)
			Kabupaten/ Kota	
			Subkegiatan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	
			Subkegiatan Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	
3	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Meningkatnya kinerja dan keberlanjutan usaha KSP/USP koperasi	Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Subkegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Subkegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	
4	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia koperasi dalam pengelolaan usaha	Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang keanggotaannya dalam daerah Kabupaten/Kota	
			Subkegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	
5	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Meningkatnya kemandirian koperasi	Kegiatan Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah	

No (1)	Program Prioritas (2)	Outcome (3)	Kegiatan/Subkegiatan (4)	Ket. (5)
			Kabupaten/Kota	
			Subkegiatan Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	
			Subkegiatan Peningkatan Produktivitas Nilai Tambah Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha	
			Subkegiatan Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	
6	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Meningkatnya kapasitas dan keberlanjutan usaha UMKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan penciptaan lapangan kerja	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	
			Subkegiatan Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	
			Subkegiatan Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	
			Subkegiatan Fasilitas kemudahan perizinan Usaha Mikro	
			Subkegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	
			Subkegiatan Koodinasi dan sinkronisasi dengan para	

No (1)	Program Prioritas (2)	Outcome (3)	Kegiatan/Subkegiatan (4)	Ket. (5)
			pemangku kepentingan dalam pemberdayaan Usaha Mikro	
7	Program Pengembangan UMKM	Meningkatnya akses pasar, pembiayaan, teknologi, dan inovasi bagi UMKM dalam rangka peningkatan produktivitas	Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil Subkegiatan Fasilitasi Usaha Mikro menjadi Usaha kecil dalam pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	
8	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengambilan kebijakan tenaga kerja yang efektif.	Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) Subkegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	
9	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatnya kompetensi dan daya saing tenaga kerja	Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Subkegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Kegiatan Konsultasi Produktifitas Pada Perusahaan Kecil Subkegiatan Pelaksanaan Konsultasi Produktifitas Kepada Perusahaan Kecil Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi Subkegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan vokasi bagi pencari kerja berdasarkan unit kompetensi Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan	

No (1)	Program Prioritas (2)	Outcome (3)	Kegiatan/Subkegiatan (4)	Ket. (5)
			Berdasarkan Unit Kompetensi	
			Subkegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	
10	Program Penempatan Tenaga Kerja	Meningkatnya kesempatan kerja bagi calon tenaga kerja	Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	
			Subkegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	
			Subkegiatan Job Fair/Bursa Kerja	
			Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	
			Subkegiatan Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	
11	Program Hubungan Industrial	Meningkatnya kualitas hubungan industrial antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah	Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Subkegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	
			Subkegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	
			Kegiatan Pencegahan dan	

No (1)	Program Prioritas (2)	Outcome (3)	Kegiatan/Subkegiatan (4)	Ket. (5)
			Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	
			Subkegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Subkegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	
			Subkegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	
12	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Meningkatnya kesiapan calon transmigran	Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Subkegiatan Penyuluhan Program Transmigrasi Kepada Calon Transmigran Penduduk Asal	

4.2. Kinerja Penyelenggara Bidang Urusan

Tabel 4.4 Indikator Kerja Utama PD

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	2025	2026	Target Tahun				Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	0,94	1,18	1,44	1,71	1,97	2,23	2,49	
2	Rasio Kewirausahaan Daerah	%	n/a	4,66	5,03	5,40	5,77	6,14	6,51	
3	Rasio Produktivitas Tenaga Kerja	Rasio	n/a	52,61	52,65	52,70	52,75	52,80	52,85	
4	Persentase pemenuhan kuota transmigrasi yang diberangkatkan	%	100	100	100	100	100	100	100	

Tabel 4.5 Indikator Kerja Kunci PD

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	2025	2026	Target Tahun				Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas (IKK)	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha (IKK)	%	20,00	20,00	22,00	25,00	28,00	30,00	35,00	
3	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja (IKK)	%	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi (IKK)	%	n/a	30	31	32	33	34	35	
5	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (IKK)	%	40,00	40,41	40,52	40,65	40,70	40,75	40,80	

6	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota (IKK)	%	20,22	20,22	20,44	20,66	20,77	20,88	20,88	
7	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (IKK)	%	100	100	100	100	100	100	100	

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan Penting Subtansial

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan tahun 2025-2029 di harapkan dapat mendukung penguatan dalam pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Daerah seperti tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pekalongan periode 2025-2029. Renstra tahun 2025-2029 ini diharapkan memberikan informasi yang memadai tentang pelaksanaan dan penjabaran tugas pokok dan fungsi serta merespon berbagai permasalahan yang di hadapi untuk lima tahun ke depan yaitu tahun 2025-2029, Sehingga dapat memperlancar tugas yang diemban sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Sebagai sebuah dokumen rencana , Rancangan Renstra Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan tahun 2025-2029 ini diharapkan dapat memberikan arahan, pedoman dan sekaligus menjadi instrumen pengawasan serta evaluasi terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan lima tahun kedepan. Sebagai sebuah dokumen rencana , Rancangan Renstra ini di jadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA) setiap tahunnya. Monitoring-evaluasi rutin diperlukan untuk memastikan efektivitas dan adaptasi terhadap dinamika kebutuhan. Dengan pendekatan ini, Renstra Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan dapat menjadi panduan strategis dan mendukung pembangunan daerah.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2029 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2025 hingga tahun 2029. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.

Rancangan Renstra Dinas Koperasi UKM Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan tahun 2025-2029 ini akan dapat direalisasikan secara baik dan optimal apabila terdapat komitmen, dukungan dan kerjasama dari seluruh pegawai Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan , Oleh karena itu di harapkan kepada seluruh pegawai Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan untuk dapat memahami secara sungguh-sungguh dan melaksanakan secara konsisten apa yang telah tertuang dalam Rancangan Renstra Dinas Koperasi UKM dan Tenga Kerja Kabupaten Pekalongan tahun 2025-2029.

Rencana Strategis Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan ini akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pekalongan wajib berpedoman pada Rencana Strategis tahun 2025 – 2029.

5.3. Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian dan evaluasi hasil Renja Koperasi UKM Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan tiap tahun melalui evaluasi hasil pelaksanaan DPA Dinas Koperasi UKM Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan per triwulan merupakan bagian integral dari pengendalian dan evaluasi hasil RKPD dan sekaligus dijadikan sebagai instrument untuk mengendalikan dan mengevaluasi efektivitas strategi dan kebijakan Renstra Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan dalam mencapai sasaran Renstra Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan.

Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kajen, 15 September 2025

Plt. KEPALA DINKOP, UKM DAN NAKER
KABUPATEN PEKALONGAN



ARGO YUDHA ISMOYO, S.STP., M.A.P.

Pembina (IV/a)
NIP. 19870411 200602 1 002